

**HUBUNGAN PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2018 - 2020)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ria Rizki Khasanah

No. Mahasiswa: 18312310

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**HUBUNGAN PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2018 - 2020)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Ria Rizki Khasanah

No. Mahasiswa: 18312310

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 15 Maret 2020

Penulis,



(Ria Rizki Khasanah)

HALAMAN PENGESAHAN

**HUBUNGAN PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI DENGAN
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN**

(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2018 - 2020)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ria Rizki Khasanah

No. Mahasiswa: 18312310

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 15 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



(Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak., CA., CMA., CAPM)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Hubungan Pengungkapan Anti Korupsi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)

Disusun oleh : RIA RIZKI KHASANAH

Nomor Mahasiswa : 18312310

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 06 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Primanita Setyono, Dra., MBA., Ak., CA., CMA., CAPM

Penguji : Sigit Pamungkas, SE., M.Com.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Prof. Saka Sriyana, Dr., M.Si



MOTTO

“Dan mudahkanlah untukku urusanku”

“Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik”

“Nothing is impossible when Allah said Kun Fayakun”



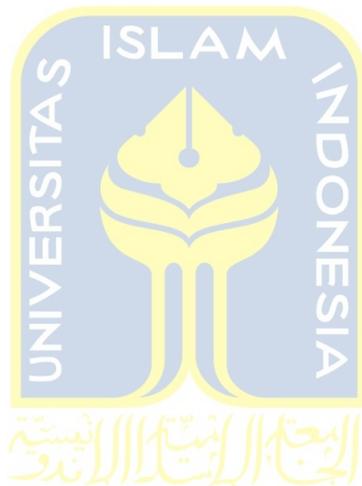
HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan sebuah karya ini untuk:

Ibu dan Bapakku,

Sri Susilawati dan Sugeng Haryanto,

yang telah senantiasa tulus memberikan dukungan dan doanya yang tiada henti sehingga mampu membuatku merasa luar biasa kuat dan selalu bersyukur



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan keberhasilan tidak lain karena Allah SWT. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini, dan semoga kita termasuk kedalam golongan umatnya.

Penelitian yang berjudul “**Hubungan Pengungkapan Anti Korupsi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)**” merupakan penelitian yang disusun sebagai salah satu syarat guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan penelitian ini, tentunya hal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang tiada henti diajukan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugeng Haryanto dan Ibu Sri Susilawati atas cinta, dukungan, doa yang tiada henti untuk keberhasilan anak-anaknya, dan pengorbanan yang kalian berikan untukku. Terima kasih selalu ada untukku, selalu percaya padaku, dan mendorong diriku dalam setiap hal yang saya lakukan. I couldn't have done this without you. I love you both.
2. Kakak dan keponakanku tercinta, Dhani Arinta Ahlul Janah, Muhammad Luqman Almasiyud, Ahmad Kamaludin terima kasih atas motivasi, doa, dukungan, kontribusi, serta telah banyak menjadi teman ataupun penghibur pribadi saya. Sangat beruntung memiliki kalian.
3. Eyang uti yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, sehat selalu.
4. Partner tersayang Yanuar Aji Pamungkas terima kasih atas segala momen luar biasa, doa, support, semangat, tempat keluh kesah, dan terima kasih telah hadir menemani di masa-masa sulit dan terendahku.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi atas bantuan, perhatian dan semua hal yang telah diajarkan kepada penulis selama tahun perkuliahan.
7. Ibu Primanita Setyono, Dra., MBA., Ak., CA., CMA., CAPM selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu membimbing, memberikan arahan

yang luar biasa dan meluangkan waktunya yang berharga dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.

8. Teman-teman HMJA KOMISI FBE UII periode 2020-2021, terima kasih atas kekompakan dalam menjalankan tanggung jawab selama ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan sukses selalu.
9. Teruntuk sahabatku Lila Ash Syfa, Andini Putri, Zaida Rahma, Ayu, Yasa Alifi, Granada, Amajida teman seperjuangan dari kuliah online sampai dengan sekarang. Sangat bersyukur bisa mengenal kalian. See you on top!
10. Temanku Alya, Maya, Tina, Della, Berlian, Nadilah, teman yang berada dalam dosen pembimbing yang sama. Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan dan cerita lucunya.
11. Sahabatku Febrianti, Indah Fajar, Ningrum, Linda, Heni, Syifa, Putri terima kasih atas semua percakapan dan menjadi teman yang luar biasa. Sejauh apapun jarak kalian, semoga persahabatan kita langgeng!
12. Teman-teman Akuntansi FBE UII 2018, atas pengalaman di masa perkuliahan yang telah dilalui semua ini bersama-sama, baik suka duka dan perjalanan yang luar biasa. Sukses dan sehat selalu.
13. Semua pihak yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Maret 2022

Penulis,

(Ria Rizki Khasanah)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1. Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	14
2.1.2. Teori Gambar (<i>Image Theory</i>).....	16
2.1.3 Teori Akuntansi Positif	17
2.1.4 Manajemen Laba	18
2.1.5 Pengungkapan Anti Korupsi	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Hipotesis Penelitian	25
2.3.1 Pengungkapan Anti Korupsi terhadap Manajemen Laba	25
2.4 Kerangka Penelitian.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian	29
3.2 Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data	30
3.3 Definisi Operasional Variabel	30
3.3.1 Manajemen laba sebagai variabel dependen	30
3.3.2 Pengungkapan Anti Korupsi sebagai variabel independen	32
3.4 Metode Analisa Data	37
3.4.1 Uji Asumsi Klasik	37
3.4.2 Uji Regresi Linear Berganda	39
3.4.3 Uji Hipotesis	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	44
4.3 Uji Asumsik Klasik	45
4.3.1 Uji Normalitas	45
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	46
4.3.3 Uji Multikolinearitas	47
4.3.4 Uji Autokorelasi	48
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	49
4.5 Uji Hipotesis	51
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.5.2 Uji T	52
4.5.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)	53
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian	54
4.6.1 Hubungan Anti Korupsi Terhadap Manajemen Laba	54
4.6.2 Peranan Variabel Kontrol	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Implikasi Penelitian	59
5.3 Keterbatasan Penelitian	60
5.4 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	28
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

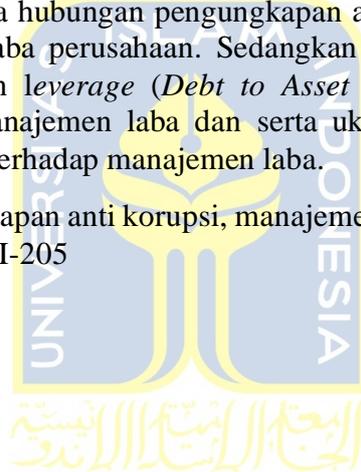
Lampiran 1 Tabulasi Data.....	65
Lampiran 2 Panduan <i>Ceklist</i> GRI 205: Anti Korupsi.....	71



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengungkapan anti korupsi terhadap manajemen laba pada perusahaan, studi kasus perusahaan sektor manufaktur tahun 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pengungkapan anti korupsi yang diukur dengan menggunakan analisis konten berdasarkan kriteria GRI (*Global Reporting Indeks*) 205 tahun 2016. Sementara itu, juga menggunakan variabel *control* profitabilitas (*Return On Asset*), *leverage* (*Debt to Asset Ratio*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba yang diukur dengan menggunakan akrual diskresioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel terhadap 255 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2018 hingga 2020 yang mengungkapkan kebijakan dan program anti korupsi. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan SPSS *Statistic* 28. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pengungkapan anti korupsi berkorelasi negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Sedangkan variabel kontrol profitabilitas (*Return On Asset*) dan *leverage* (*Debt to Asset Ratio*) memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan serta ukuran perusahaan (*SIZE*) tidak memiliki berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: pengungkapan anti korupsi, manajemen laba, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, GRI-205



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik akuntansi berpedoman pada kerangka konseptual dan standar akuntansi yang berlaku, di Indonesia seperti Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut memberikan pedoman bagi perusahaan terkait bagaimana pencatatan, pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan elemen-elemen pada laporan keuangan. Di sisi lain, meskipun sifatnya memberikan pedoman, PSAK memberikan diskresi kepada manajemen terkait pilihan-pilihan metode atau kebijakan akuntansi yang pada akhirnya berdampak pada figur-figur laporan keuangan, terutama laba bersih. Dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada peraturan resmi yang membahas manajemen laba. Tentang apakah manajemen laba dilarang ataupun tidak. Padahal sejatinya didalam dunia akuntansi, semua kegiatan pelaporan harus didasarkan pada peraturan tertulis yang telah ditetapkan. Walaupun tidak adanya badan yang mengeluarkan peraturan resmi tentang manajemen laba, tetapi terdapat peran yang dapat menggantikan peraturan tersebut. Diperlukan peran monitoring dari dewan komisaris baik itu yang mengawasi kegiatan dan operasional perusahaan serta pemberi nasihat kepada dewan direksi. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang manajemen laba maka tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak manajer yang melakukan kesempatan tersebut, terutama akan lebih tinggi jika tidak ada pengawasan oleh pemilik atau dewan komisaris. Manajemen laba terjadi pada saat manajemen menggunakan suatu kebijakan

dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan yang dilaporkan dengan tujuan mempengaruhi persepsi *stakeholders* mengenai kinerja perusahaan atau mempengaruhi hasil kontraktual yang tergantung pada nilai akuntansi yang dilaporkan (Healy et al., 1998). Manajer melakukan manajemen laba dengan menerapkan beberapa upaya diantaranya dengan *Taking a Bath*, *Income Minimization* (minimal pendapatan), *Income Maximization* (maksimalisasi pendapatan), dan *Income Smoothing* (pemerataan laba). Pada dasarnya, manajemen laba merupakan fenomena yang sulit dihindari karena merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen laba diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu akuntansi curang, manajemen akrual, dan manajemen laba nyata (Gunny, 2005). Tidak terdapat regulasi resmi mengenai teknik meredam manajemen laba, tetapi perilaku tersebut dapat diminimalkan dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance* (GCG).

Berbagai macam definisi yang diberikan oleh peneliti tentang manajemen laba. Dari sisi etika, manajemen laba diartikan sebagai “*any action on the part of management which affects reported income and which provides no true economic advantage to the organization and may in fact, in the long-term, be detrimental*” (Merchant & Rockness, 1994). Menurut (Copeland, 1968) manajemen laba diartikan sebagai “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Pada dasarnya, manajemen diperkenankan untuk menerapkan pemilihan metode akuntansi (*accounting choice*) dalam melakukan

pemilihan metode akuntansi yang digunakannya. Melalui pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan, manajemen dapat menentukan informasi apa saja yang akan ditampilkan kepada para pengguna laporan keuangan tersebut. Sayangnya, para pengguna laporan keuangan memiliki keterbatasan pemahaman yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi atau *information asymmetry*. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya kesalahan dalam penetapan keputusan (*adverse selection problems*) dan pelanggaran peraturan (*moral hazards*). Dengan demikian tindakan manajemen laba menyebabkan *information asymmetry* pada pengguna laporan keuangan sehingga manajemen akan terasa leluasa dalam melakukan penyimpangan.

Terdapat konsekuensi negatif ketika manajer perusahaan diketahui melakukan manajemen laba. Pada hakekatnya praktik manajemen laba dapat menyebabkan reliabilitas dari laba tereduksi, karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran laba sehingga pelaporan laba menjadi tidak seperti yang seharusnya dilaporkan. Praktik manajemen laba dapat dinilai merugikan karena dapat menurunkan kualitas laporan keuangan serta dapat memberikan informasi yang tidak relevan bagi investor. Peran regulator dalam menghadapi praktik manajemen laba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif adalah tindakan regulator untuk meminimalkan kemungkinan manajer melakukan praktik manajemen laba, misalnya dengan cara meningkatkan kewajiban pengungkapan informasi (*disclosure*) yang berkaitan dengan akrual perusahaan. Selain itu, apabila manajer perusahaan ketahuan dalam melakukan manajemen

laba, konsekuensi jangka panjang adalah hilangnya dukungan dari *stakeholder* dan meningkatnya kewaspadaan dari *stakeholder* tersebut (Zahra et al., 2005). Tindakan kuratif dapat diwujudkan dengan cara pemberian sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan praktik manajemen laba. Misalnya yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga mengelembungkan laporan keuangan sejumlah 4 triliun tahun 2017 dan baru terungkap pada Maret 2019. Ketika hal tersebut terungkap, manajemen AISA mendapatkan sanksi dari regulator.

Sejak tahun 2003, masyarakat global melalui konvensi PBB tentang Antikorupsi (*United Nation Converention Against Corruption-UNCAC*) telah menyepakati bahwa pihak korporasi/swasta merupakan salah satu pilar penting dalam upaya menangani pencegahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa masih rendahnya keterlibatan perilaku korupsi dan rendahnya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan korporasi di Indonesia. Korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana ketika melakukan tindak pidana korupsi. UNCAC (*United Nation Converention Against Corruption*) merupakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yang berlaku secara global, yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif. Sesuai dengan pasal 26 UNCAC (*United Nation Converention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menegaskan tentang pentingnya setiap negara peserta konvensi untuk memiliki regulasi mengenai peraturan yang mengatur pertanggungjawaban korporasi jika melakukan tindak pidana korupsi baik berupa sanksi pidana,

perdata maupun administrasi yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan (*monetary sanction*). Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut sebagai UU Tindak Pidana Korupsi yang telah mengkualifikasi korporasi/swasta sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan hal ini yakni pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 3, Pasal 20 ayat 1, Pasal 20 ayat 2, Pasal 20 ayat 7. Walaupun UU Tindak Pidana Korupsi telah mengatur larangan serta ancaman pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, namun masih terdapat keterbatasan mengenai jumlah total korporasi/swasta yang diproses secara hukum dan diputuskan benar-benar bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kondisi tersebut, terbitlah (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi/swasta. Disimpulkan bahwa PERMA ini memberikan panduan hukum acara tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi/swasta. Selain itu, satu dari pasal yang cukup penting yang termuat dalam Perma tersebut yaitu (Pasal 4 Ayat 2) tentang penilaian hakim atas kesalahan korporasi/swasta. Selain itu, melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 mewajibkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur anti korupsi di emiten atau perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).

Regulator tampaknya mulai sadar bahwa pihak swasta/korporasi harus diikutsertakan dalam upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, telah ditetapkan bahwa salah satu aksi pemberantasan korupsi yaitu dengan adanya upaya sertifikasi anti korupsi. Upaya ini diwujudkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui penerapan suatu sistem yang kemudian disebut sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Badan Standarisasi Nasional (BSN) mencatat bahwa per desember 2018, sejumlah instansi telah menerapkan SMAP, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Narkotika Nasional (BKN), Satuan Kerja Khusus Migas (SKKM) dan instansi lainnya. Berdasarkan *website* (<https://bsn.go.id/>) Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang dapat memberikan panduan terhadap unit organisasi dalam menerapkan sistem manajemen yang bertujuan untuk mencegah penyuapan. Rancangan sistem ini bertujuan untuk melaksanakan tiga hal berupa pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan. BSN menyatakan bahwa penerapan SMAP akan menjadi alat yang efektif dalam memberantas korupsi. Tidak hanya bertujuan untuk pencegahan penyuapan tetapi juga mengajak seluruh *stakeholders* untuk menaati peraturan, memberikan kepastian kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait penyuapan serta membangun budaya integritas di lingkungan kerja.

Secara global, tren penerapan antikorupsi di korporasi/swasta meningkat untuk memitigrasi risiko hukum, risiko komersial dan risiko reputasi. Program antikorupsi memberikan manfaat dalam menunjukkan respons korporasi/swasta

mengenai komitmen perusahaan untuk berbisnis secara bersih, bertanggung jawab dan memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi risiko korupsi. Jika hal ini dilakukan secara transparan maka dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya: pertumbuhan yang berkelanjutan, penghematan biaya dan mengurangi risiko hukuman maupun kejadian yang membahayakan. Pihak regulator sangat disarankan untuk menerbitkan panduan sebagai pedoman atau penetapan pilihan program standar yang dapat dijadikan acuan bagi korporasi/swasta dalam membangun program antikorupsi. SNI ISO 37001: 2006 merupakan standar program yang dikeluarkan oleh BSN dan KAN yang isinya tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang merupakan standar internasional. Akan tetapi, sampai dengan sekarang pemberlakuannya masih dapat dikatakan sukarela (*voluntary mandatory*).

Penelitian terdahulu mengenai manajemen laba yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya: penelitian yang telah dilakukan oleh (Prior et al., 2007) meneliti tentang hubungan antara manajemen laba dengan CSR pada perusahaan yang masuk dalam database milik SiRi (*Sustainable Investment Research International Company*). Penelitian ini menyatakan bahwa manajer perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung aktif dalam melaksanakan kebijakan CSR guna untuk meningkatkan citra serta menarik dukungan publik dan *stakeholders*. Hasil dari penelitian mereka terdapat pengaruh positif yang signifikan antara manajemen laba dengan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan anti korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, contohnya seperti (Joseph et al., 2016) yang

meneliti secara kualitatif tentang pengungkapan anti korupsi di negara Malaysia dan Indonesia, penelitian tersebut hanya analisis deskriptif. (Karim et al., 2017) menganalisa pengungkapan anti korupsi dan kinerja keuangan studi kasus perusahaan terdaftar di indeks sri kehati dan hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pengungkapan anti korupsi hanya dengan kebijakan *whistle blowing* yang diungkap penuh oleh semua perusahaan yang masuk sampel.

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini bahwa secara umum tindakan manajemen laba dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi akuntansi dan sisi etika akuntansi tergantung pada penerapan pemilihan metode akuntansi yang dipakainya. Dari sisi akuntansi, tindakan manajemen laba secara legal sah-sah saja jika dilakukan oleh manajer perusahaan dikarenakan tidak melanggar peraturan atau hukum yang telah berlaku. Tidak ada yang dilanggar karena pemilihan metode akuntansi yang tidak melanggar standar akuntansi yang berlaku disamping kewenangan manajer dalam memilih metode akuntansi yang akan dipakai. Namun menjadi terdistorsi oleh manajemen sehingga mengorbankan kepentingan pihak pengguna informasi keuangan tersebut. Apabila laporan ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya, maka informasi tersebut dapat menyesatkan karena laporan keuangan kurang andal. Jika dilihat dari sisi etika akuntansi, manajemen laba merupakan salah satu masalah penting dalam dunia bisnis. Etis atau tidaknya manajemen laba dilihat dari sudut pandang tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kewajiban pihak terkait. Manajemen laba akan menjadi tidak beretika ketika dilakukan dalam menghadapi tekanan persaingan

untuk menunjukkan kinerja tinggi dengan laba yang tinggi serta adanya perilaku oportunistik manajemen. Manajer yang oportunistik ketika laba perusahaan dikaitkan dengan kompensasi manajer, manajer akan oportunistik untuk meningkatkan laba dengan memanipulasinya, bukan karena akrual yang tidak terhindarkan. Sehingga dengan hal seperti itu laporan keuangan menjadi terdistorsi, padahal informasi pada laporan keuangan digunakan oleh *stakeholder*. Hal ini menjadikan bahwa perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer menjadi tidak etis. Telah dijelaskan di dalam peraturan mengenai penerapan (*good corporate governance*) yang dikeluarkan oleh (BUMN) No PER-01/MBU/2011 bahwa salah satu standarnya yaitu dengan menerapkan pengungkapan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mematuhi dan apabila tidak mematuhi ataupun tidak menerapkan pengungkapan anti korupsi, perusahaan harus mengungkapkan alasan kenapa tidak patuh terhadap aturan tersebut. Ketika perusahaan mengungkapkan praktik anti korupsi, artinya secara internal perusahaan, manajemen melakukan tindakan yang jauh dari praktik korupsi atau manipulatif. Dilihat dari penjelasan permasalahan tersebut, berkesimpulan bahwa penelitian ini digunakan untuk menguji apakah komitmen anti korupsi perusahaan yang tertuang dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan menjadi pertimbangan dan mempengaruhi insentif manajer dalam membuat diskresi kebijakan laba perusahaan.

Selain permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian tentang hubungan CSR khususnya anti korupsi dengan manajemen laba masih terbilang jarang. Hal ini menjadi topik yang menarik bagi penulis untuk melakukan

penelitian. Penelitian ini memperluas penelitian yang telah dilakukan oleh (Khasanah & Kusuma, 2020) hanya terdapat perbedaan di tahun penelitannya saja. Dimana objek penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Kusuma, 2020) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Sedangkan objek yang digunakan oleh penulis yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020. Rentang tahun ini digunakan karena terdapat ketidakstabilan tentang tingkat skor dalam indeks persepsi korupsi perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, pemilihan perusahaan manufaktur digunakan sebagai sampel karena perusahaan manufaktur termasuk emiten terbesar dari seluruh perusahaan yang listing di BEI, hal ini mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar atau investor untuk berinvestasi. Dasar ini menjadikan perusahaan manufaktur selalu mendapatkan perhatian dan sorotan para pelaku pasar. Dari deskripsi tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi manajemen dari beberapa perusahaan manufaktur melakukan tindakan manajemen laba. Serta dalam penelitian ini menggunakan metode akrual, dan pencatatan laporan keuangan yang digunakan lebih kompleks dibandingkan perusahaan lain. Misalnya diperusahaan manufaktur, terdapat pencatatan penyesuaian persediaan, yang berbeda dari perusahaan lain. Dengan melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan anti korupsi terhadap manajemen laba. Maka peneliti menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan pengungkapan anti korupsi sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan tambahan variabel yaitu variabel kontrol

diantaranya: profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (*SIZE*), dan *leverage* untuk membantu penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Pengungkapan Anti Korupsi Dengan Manajemen Laba Pada Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2020)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, dapat dipetik bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan antara pengungkapan Anti Korupsi terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, sehingga tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat hubungan antara pengungkapan Anti Korupsi terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat masa depan bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai manajemen laba pengungkapan anti korupsi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 - 2020.
2. Bagi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.
Dapat memberikan manfaat dalam peningkatan praktik pengungkapan CSR bagi perusahaan manufaktur, terkhusus dalam aspek anti korupsi dan manajemen laba.
3. Bagi akademisi atau peneliti.
Dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari variabel penelitian, teori-teori relevan yang digunakan yaitu (*legitimacy theory, image teory*, dan teori akuntansi positif), tinjauan literatur pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

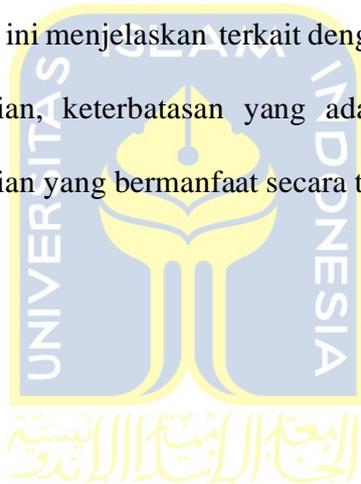
Bagian ini menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, Teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bagian ini menjelaskan tentang sampel penelitian yang diperoleh, statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi, pengujian hipotesis serta pembahasan hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan terkait dengan simpulan berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan yang ada di penelitian, serta implikasi penelitian yang bermanfaat secara teoritis dan praktis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan juga dapat diukur dengan menggunakan ukuran kinerja perusahaan lainnya yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan. Contohnya yaitu pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang di-*publish* oleh perusahaan. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai sarana pemberitahuan kepada *stakeholders* terutama kepada pemilik ataupun investor mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Pengungkapan kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu *good news* yang memuaskan keinginan *stakeholders*, maka dari itu keharmonisan hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* masih tetap terjaga. Banyak peneliti yang membahas CSR dengan menggunakan teori legitimasi didalam penelitiannya. Dikarenakan teori ini sangat padu apabila dikaitkan dengan kegiatan CSR.

Teori legitimasi menjelaskan mengenai hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh legitimasi sesuai dengan batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam teori ini juga dijelaskan ketika keberadaan perusahaan ingin diterima

oleh masyarakat, maka perusahaan harus memberikan pengungkapan informasi yang akurat mengenai kegiatan sosialnya. Tujuan dilakukannya hal tersebut yaitu agar perusahaan memiliki citra yang baik dihadapan masyarakat. Sehingga dalam waktu jangka panjang, keberadaan perusahaan akan diakui oleh masyarakat dan keberlangsungan hidup perusahaan akan ikut terjamin (Reverte, 2009).

Untuk memperoleh legitmasi, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan masyarakat untuk dapat menjalankan proses bisnisnya. Ketika perusahaan gagal dalam pemenuhan harapan dan keinginan masyarakat, hal tersebut akan berakibat fatal untuk kelangsungan proses bisnisnya. Sehingga dapat menjadikan hilangnya legitmasi dan dukungan yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Pengungkapan CSR dan anti korupsi yang terdapat di dalam laporan tahunan merupakan cara dari perusahaan untuk mengkomunikasikan, menciptakan hubungan, menjaga reputasi serta me-legitimasi atas hal positif yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketika perusahaan memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya, kemungkinan besar keberadaan perusahaan akan diterima oleh para pemangku kepentingan. Hal ini berarti perusahaan menunjukkan transparansi dan kepatuhan atas informasi yang diungkapkan. Penerapan dari bentuk transparansi informasi adalah pengungkapan kegiatan antikorupsi dengan tujuan agar memperoleh penilaian mengenai

mitigrasi risiko perusahaan terhadap praktik penyuaipan dan korupsi (O'Brien et al., 2009).

2.1.2. Teori Gambar (*Image Theory*)

Setiap perusahaan pasti memiliki citra tersendiri, baik disadari ataupun tidak disadari yang telah melekat pada setiap perusahaan. Citra pada perusahaan merepresentasikan nilai - nilai individu ataupun masyarakat yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa citra sebagai persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Citra bersifat abstrak dan hanya ada dalam pikiran, tetapi wujudnya bisa dirasakan melalui hasil penilaian baik buruk yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Merupakan salah satu aset terpenting tidak berwujud yang harus dijaga, dibangun dan dipelihara oleh perusahaan. Tidak ada perekayasa citra antara masyarakat dan perusahaan. Citra tidak datang dengan sendirinya tetapi sebuah proses yang dibentuk oleh masyarakat dari upaya yang diberikan oleh perusahaan seperti keterbukaan informasi dan komunikasi untuk membangun citra yang positif. Upaya pembangunan citra tidak dilakukan begitu saja, tetapi melewati sebuah proses yang sangat panjang.

Citra merupakan hasil evaluasi yang ada dalam pribadi seseorang yang didasarkan pada pemahaman, penilaian, pengorganisasian dan pengelolaan. Citra merupakan gambaran reputasi, nilai positif dan kepercayaan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai aset tidak

berwujud. Kualitas citra yang diperoleh perusahaan akan menentukan keputusan para pemangku kepentingan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Citra yang dimiliki perusahaan menjadi tolak ukur yang dipegang oleh para pemangku kepentingan sebagai sarana pengambilan keputusan. Perusahaan yang dipandang memiliki citra dan nilai positif oleh para pemangku kepentingan tentunya akan menciptakan nilai - nilai positif. Atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, perusahaan berkeyakinan untuk menciptakan laba yang bermutu dan mengurangi perilaku manajemen laba.

Merupakan salah satu aset penting bagi setiap perusahaan, karena mempengaruhi: a) keputusan investor dalam melakukan investasi, b) bahan pertimbangan konsumen untuk membeli barang/jasa, c) bahan keputusan pemasok untuk bekerjasama, d) semangat bersaing untuk memasuki pasar perdagangan, e) bahan motivasi perusahaan untuk kualitas karyawan, f) memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana untuk membantu proses bisnisnya (Gaultier-Gaillard et al., 2009).

2.1.3 Teori Akuntansi Positif

Peneliti berpendapat bahwa teori akuntansi positif merupakan pendekatan yang berorientasi pada studi yang menjelaskan berbagai metode akuntansi yang sering digunakan (Watts & Zimmerman, 1990). Terdapat tiga hipotesis tentang teori akuntansi positif, diantaranya: a) Hipotesis rencana bonus, dimana manajer perusahaan cenderung

memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa sekarang. b) Hipotesis kontrak hutang, dimana semakin dekat perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya semakin besar kemungkinan manajer perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini. c) Hipotesis biaya politik, dimana semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka manajer perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang ke masa depan.

2.1.4 Manajemen Laba

Pada umumnya manajemen laba sering kali dikaitkan dengan upaya me-manage pendapatan untuk kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Tindakan yang dilakukan manajer untuk melakukan manajemen laba dapat berakibat buruk karena dapat menyesatkan informasi yang diterima oleh pemakainya. Tindakan manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan juga dapat mengganggu pemakai dalam mempercayai angka hasil perekayasaan tersebut untuk mencapai keputusan.

Istilah manajemen laba bukanlah suatu hal yang baru terdengar bagi ahli ekonom. Terdapat berbagai pandangan, kontroversi, serta bahan diskusi yang berbeda terhadap praktik manajemen laba yang menimbulkan kontroversi etis. Jika dilihat disatu sisi bahwa manajemen

laba dapat dipandang sebagai tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dikarenakan akibat adanya manajemen laba mengakibatkan informasi- informasi yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan bagaimana perusahaan yang sesungguhnya terjadi. Tindakan tersebut dapat menyebabkan investor keliru dalam mengambil keputusan bisnisnya. Jika dilihat dari sisi yang lain bahwa manajemen laba dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan tindakan rasional yang digunakan untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam ketentuan untuk pelaporan keuangan.

Ada beberapa motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Laba (*earnings*) sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, digunakan sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, sebagai dasar menghitung penghasilan kena pajak serta sebagai dasar kriteria penilaian kinerja perusahaan. Motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba berkaitan dengan adanya informasi akuntansi. Informasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan konflik antar pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990).

2.1.5 Pengungkapan Anti Korupsi

Korupsi semakin dipandang sebagai hambatan yang paling berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi. Menurut (Putra et al., 2018) memaparkan bahwa “korupsi telah diidentifikasi sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi dan kemunduran ekonomi, masyarakat,

dan sistem politik”. (Kimbrow, 2002) juga berpendapat bahwa “korupsi juga mempengaruhi alokasi sumber daya, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan swasta, dan memiliki dampak kemunduran dalam masyarakat”. Dengan berbagai banyak dampak yang ditimbulkan, hal ini menyebabkan tuntutan organisasi bisnis untuk menjalankan strateginya untuk melawan korupsi yang semakin meningkat (Hills et al., 2009). Salah satu caranya yaitu melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Inisiatif atas pelaporan perusahaan yang berorientasi anti korupsi telah berkembang melalui pengungkapan wajib maupun sukarela.

Tata kelola perusahaan harus selaras dengan tujuan akuntansi untuk memberikan informasi tentang keuangan, dan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan perusahaan mengarah pada probabilitas yang lebih tinggi dari tindakan korupsi yang terdeteksi, yang mengurangi ketimpangan informasi antara pemegang saham dengan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang paling tepat (Wu & Wu, 2005).

(Clark & Hebb, 2005) menjelaskan bahwa “pernyataan publik tentang komitmen perusahaan terhadap langkah-langkah anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran akan masalah di antara pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan pada gilirannya memberikan keterlibatan kredibilitas anti korupsi perusahaan, karena memungkinkan pemangku

kepentingannya untuk meneliti upaya-upaya perusahaan”. (Hills et al., 2009) berpendapat bahwa “strategi pencegahan korupsi menjadi bagian dari kebijakan keberlanjutan perusahaan dan diterapkan pada semua bagian perusahaan”. Oleh karena itu, langkah-langkah informasi anti korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaporan perusahaan tentang dampak sosial dan lingkungan.

(Transparency International, 2010) menyatakan “bahwa komitmen pendekatan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya termasuk juga tentang bagaimana resiko korupsi dan praktik suap dalam perusahaan dinilai dan dimitigasi”. (Lloyd Bierstaker, 2009) merekomendasikan bahwa “kebijakan antikorupsi masuk dalam pedoman kegiatan CSR yang harus disetujui oleh direksi”. Pengungkapan informasi anti korupsi menjadi indikasi bahwa segala konsekuensi negatif akibat perilaku karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan dan berdampak pada integritas, reputasi serta legitimasi perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Chih et al., 2008) yang menguji mengenai CSR, *Investor Protection*, dan manajemen laba. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hubungan antara CSR dan manajemen laba bergantung pada manajemen laba mana yang dipertimbangkan. Ketika manajemen laba diproyeksikan dengan pemerataan laba, maka CSR berhubungan negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yip et al., 2011) menguji pelaporan CSR dengan pendapatan manajemen. Hasil menunjukkan bahwa CSR dan manajemen laba berhubungan negatif dalam industri minyak dan gas. Tetapi, CSR berhubungan positif dalam industri makanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mohamad et al., 2012) yang menguji tentang independensi dewan, keragaman dewan dan manajemen laba dengan menggunakan variabel moderasi yaitu CSR. Dimana hasil menunjukkan bahwa CSR dan *corporate governance* memiliki hubungan yang negatif, selain itu independensi dewan, keragaman dewan, dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh utama dengan manajemen laba di Malaysia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kim et al., 2012) Dengan menggunakan variabel independent yaitu kualitas laba dan CSR sebagai variabel dependen telah membuktikan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Karim et al., 2017) yang menguji pengaruh pengungkapan anti korupsi terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas (ROA). Dengan menggunakan subjek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Indonesia dan Indeks FTSEGoods Malaysia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan anti korupsi berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan jangka panjang dan

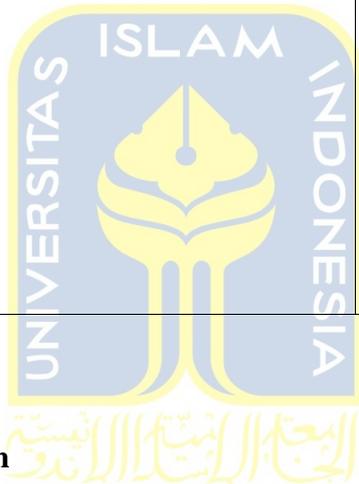
pendek untuk perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Indonesia dan FTSE Goods Malaysia.

Penelitian yang dilakukan (Khasanah & Kusuma, 2020) yang menguji pengaruh pengungkapan anti korupsi terhadap manajemen laba di perusahaan yang terdaftar di BEI 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anti korupsi berkorelasi negatif dengan manajemen laba perusahaan. Selain itu, profitabilitas dan *leverage* memberikan hasil yang positif signifikan, sedangkan untuk *size* memberikan hasil yang negatif.

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Chih et al., 2008)	<ul style="list-style-type: none"> • VI: CSR, Investor Protection • VD:Earnings Manajemen 	<p>Bahwa jenis hubungan antara CSR dan Manajemen Laba tergantung pada EM mana yang dipertimbangkan. Ketika EM diproyeksikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perataan laba maka CSR berhubungan negatif 2. Agresivitas laba maka positif <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran kerugian pendapatan maka positif
2	(Yip et al., 2011)	<ul style="list-style-type: none"> • VI:Corporate Social Responsibility Reporting 	<ul style="list-style-type: none"> • CSR dan manajemen laba berhubungan negatif dalam industri minyak dan gas.

		<ul style="list-style-type: none"> • VD:Revenue Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi CSR berhubungan positif dalam industri makanan
3	(Mohamad et al., 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • VI: Independensi dewan, keragaman dewan • VD: Manajemen laba • Variabel moderasi: CSR 	<ul style="list-style-type: none"> • CSR dan <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif. • Bahwa independensi dewan, keragaman dewan, dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh utama dengan manajemen laba di Malaysia.
4	(Kim et al., 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • VI: Kualitas laba • VD: CSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5	(Karim et al., 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • VI: Pengungkapan anti korupsi • VD: Kinerja Keuangan Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan anti korupsi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan dalam jangka panjang dan pendek untuk perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Indonesia dan FTSE Goods Malaysia

6	(Khasanah & Kusuma, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • VI: Pengungkapan anti korupsi • VD: Manajemen laba 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengungkapan anti korupsi dengan manajemen laba • Penelitian ini juga memberikan hasil positif yang signifikan untuk profitabilitas dan <i>leverage</i>, yang konsisten dengan teori akuntansi positif yang mendukung rencana bonus dan hipotesis perjanjian utang.
---	---------------------------	---	--



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengungkapan Anti Korupsi terhadap Manajemen Laba

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholders*, terkadang perusahaan terlibat dalam berbagai kegiatan CSR. Dari program CSR yang diselenggarakan, pastinya *stakeholders* akan memberikan nilai tambah berupa apresiasi yang lebih bagi perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ketika perusahaan tidak mempublikasikan kegiatan positif berupa tanggung jawab sosial, maka para investor tidak akan menghargai atas kontribusi

positif yang dilakukan oleh perusahaan. Kecuali para investor memiliki dampak pada reputasi perusahaan (van Dijken, 2007). Fakta membuktikan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan kepada masyarakat mengenai pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Dilihat dari sudut pandang teori legitimasi bahwa pengungkapan informasi sangat diperlukan sebagai salah satu alat penting bagi perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh sehingga dapat beroperasi dalam menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan nilai sosial yang ada untuk mempertahankan serta memperoleh legitimasi sosial (Guthrie et al., 2006).

Pendapat (Karim et al., 2017) menyatakan bahwa, ketika sebuah perusahaan memberikan pernyataan tentang pengungkapan antikorupsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat prospek yang cukup baik pada kinerja keuangan dengan adanya pencegahan tindakan negatif yang dapat mempengaruhi produktifitas perusahaan tersebut. Kegiatan dan praktik tersebut merupakan cakupan pengungkapan antikorupsi yang diharapkan oleh publik. Sehingga, apabila manajer terlibat dalam aktivitas seperti ini, akan cenderung membatasi kegiatan manajemen laba dan memberikan keputusan operasional perusahaan yang bertanggungjawab, maka dari itu terjaganya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan dan dapat dipercaya oleh publik.

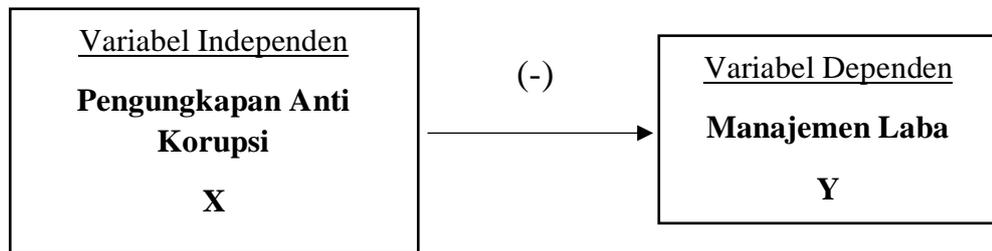
Pengungkapan antikorupsi yang digunakan sebagai bagian dari pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan oleh perusahaan untuk memberikan pemikiran dan sebagai sinyal kepada publik mengenai pencegahan korupsi (Karim et al., 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Chih et al., 2008; Karim et al., 2017; Khasanah & Kusuma, 2020; Kim et al., 2012; Mohamad et al., 2012; Yip et al., 2011) yang menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi berkorelasi negatif terhadap manajemen laba. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H1: Hubungan pengungkapan Anti Korupsi berkorelasi negatif terhadap Manajemen Laba.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan penjelasan secara teoritis mengenai hubungan antar variabel yang akan penulis teliti, baik itu variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen laba. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan anti korupsi. Terdapat 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Y dan X, yaitu:

1. Variabel Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Pada penelitian ini variabel manajemen laba
2. Variabel X merupakan variabel independen atau variabel bebas. Pada penelitian ini variabel pengungkapan anti korupsi merupakan variabel X



Gambar 1.1 (Kerangka Penelitian)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2020. Rentang waktu ini digunakan penulis karena terdapat ketidakstabilan tentang tingkat skor dalam indeks persepsi korupsi perusahaan di Indonesia. Sedangkan, pemilihan perusahaan manufaktur digunakan penulis sebagai sampel karena penelitian ini menggunakan metode akual, dan pencatatan laporan keuangan yang digunakan lebih kompleks dibandingkan perusahaan lain. Misalnya diperusahaan manufaktur, terdapat pencatatan penyesuaian persediaan, yang berbeda dari perusahaan lain. Pengambilan sampel menggunakan *metode purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020
2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan tahunan lengkap tahun 2018-2020
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami rugi dalam periode 2018-2020

3.2 Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan selama periode pengamatan. Data untuk pengungkapan anti korupsi diperoleh dengan *hand collection* dalam laporan tahunan perusahaan yang mengacu pada instrument GRI 205: anti korupsi (2016), kemudian untuk data manajemen laba diperoleh melalui laporan tahunan yang diperoleh melalui *website* BEI www.idx.co.id serta *website* resmi dari setiap perusahaan yang diteliti.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan hipotesis yang diujikan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan variabel independen penelitian ini adalah pengungkapan anti korupsi. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel kontrol yaitu profitabilitas (ROA), *Leverage* (DAR), dan ukuran perusahaan (*SIZE*).

3.3.1 Manajemen laba sebagai variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pengukuran manajemen laba pada penelitian ini menggunakan proksi *Discretionary Accruals* (DA) menurut Model Modifikasi Jones (Dechow et al., 1995). Pemilihan menggunakan metode perhitungan manajemen laba didasari pada penghitungan nilai diskresi yang paling sesuai untuk jenis perusahaan. Perbedaan penggunaan metode pengukuran tingkat manajemen laba tidak akan

menurunkan substansi dari hasil komparasi data tingkat manajemen laba. Hal ini disebabkan karena sifat dari perusahaan itu sendiri, dimana industri tertentu tentunya memiliki preferensi dalam menggunakan akrual yang menurut mereka “mampu” menjadi alat manajemen laba yang baik. Cara – cara menentukan manajemen laba yaitu dengan formula: dalam model ini, akrual non-diskresioner diperkirakan sebagai persamaan berikut:

- (1) Menghitung TAC (Total Accrual) dengan menggunakan rumus laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t, dengan rumus:

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total *accrual* perusahaan I pada periode ke t (sekarang)

NI_{it} = Laba bersih perusahaan I pada periode ke t (sekarang)

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada periode ke t (sekarang)

Kemudian, mengestimasi TA (Total *Accrual*) dengan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk menentukan koefisien regresi, dengan rumus:

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

- (2) Koefisien regresi yang telah didapat dengan menggunakan rumus di atas, maka NDA (*Nondiscretionary Accruals*) didapat dengan rumus:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

Keterangan:

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan (tahun t dikurangi t-1)

PPE_{it} = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

(3) Langkah terakhir, DA (*Discretionary Accruals*) sebagai ukuran manajemen laba didapat dengan rumus:

$$DAC_{it} = (TAC_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan:

DAC_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t (sekarang)

NDA_{it} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

TAC_{it} = Total *accruals* perusahaan i pada periode ke t (sekarang)

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

3.3.2 Pengungkapan Anti Korupsi sebagai variabel independen

Pengukuran pengungkapan anti korupsi diukur dengan menggunakan penilaian indeks anti korupsi berdasarkan instrumen *Global Reporting Initiative (GRI) 205: anti korupsi (2016)*. Indeks ini terdapat beberapa indikator dalam subkategori, diantaranya: a) pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103), b) 205-1:

operasi – operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, c) 205-2: komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi, d) 205-3: insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Kategori dibagi menjadi 19 item dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori pengungkapan pendekatan manajemen, terdiri dari 2 aspek dan 7 indikator.
- b. Kategori operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, yang terdiri dari 2 aspek dan 2 indikator.
- c. Kategori komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi, terdiri dari 5 aspek dan 5 indikator.
- d. Kategori insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil, terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator.

Pengukuran indeks pengungkapan anti korupsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis konten pada laporan tahunan perusahaan dengan skor (1) dan (0). Skor (1) digunakan untuk perusahaan yang melaporkan item pengungkapan anti korupsi. Sedangkan skor (0) digunakan untuk perusahaan yang tidak melaporkan item pengungkapan anti korupsi (Haniffa & Cooke, 2005). Kemudian, skor yang diperoleh tiap item dijumlahkan untuk mendapatkan skor total item yang diungkapkan. Kemudian, skor total item yang diungkapkan dibagi dengan total item pengungkapan untuk menghasilkan nilai indeks pengungkapan korupsi (ACDI) untuk setiap perusahaan. Dengan menggunakan formula:

$$\text{ACDI} = \text{Total item yang diungkapkan} / \text{Total item pengungkapan}$$

3.3.3. Variabel Kontrol

Diartikan sebagai variabel yang dapat dikendalikan. Dalam pengendaliannya, pengaruh antar variabel bebas dan terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Variabel control memberikan beberapa fungsi diantaranya adalah untuk: mencegah hasil dari perhitungan bias, digunakan untuk melengkapi ataupun mengontrol hubungan kausalnya agar lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang baik dan lengkap, digunakan untuk mengontrol hubungan antar variabel bebas dan terikat (hal ini diduga bahwa variabel kontrol juga berpengaruh terhadap variabel bebas). Jika dilihat menurut penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam variabel kontrol yang digunakan untuk mengontrol hubungan pengungkapan anti korupsi terhadap manajemen laba, diantaranya profitabilitas, *lverage*, dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini juga memberikan beberapa variabel kontrol ke dalam analisis penelitian untuk mengontrol berbagai faktor lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel dependen, yang mungkin dapat mengganggu hasil uji variabel independen pengungkapan anti korupsi. Tujuan adanya tambahan variabel kontrol ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan spesifikasi model empiris yang digunakan dan menghindari adanya hasil perhitungan yang bias dalam penelitian.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu: profitabilitas (*Return On Asset*), *lverage* (*Debt To Asset*)

Ratio), dan ukuran perusahaan (*SIZE*). Kemungkinan faktor profitabilitas (*Return On Asset*), *leverage (Debt To Asset Ratio)*, dan ukuran perusahaan (*SIZE*) yang ikut berpengaruh terhadap manajemen laba yang mungkin perlu mendapat perhatian secara spesifik (dikontrol).

3.3.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas menjadi faktor yang memiliki hubungan positif dengan manajemen laba menurut temuan penelitian (Sun et al., 2010). Tingginya rasio profitabilitas menunjukkan capaian kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Selain itu meningkatnya rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat. Pada penelitian ini, pengukur profitabilitas menggunakan rasio pengembalian aset (*return on asset*) sebagai berikut:

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \text{Total Laba} / \text{Total Aktiva}$$

3.3.3.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menjadi faktor yang memiliki hubungan positif dengan manajemen laba menurut hasil penelitian (Khasanah & Kusuma, 2020). Ukuran perusahaan merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran perusahaan juga dapat memudahkan akses perusahaan untuk masuk ke pasar modal. Perusahaan kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dikarenakan

perusahaan kecil ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Biasanya bentuk manipulasi yang dilakukan perusahaan kecil yaitu memanipulasi laba untuk menghindari kerugian yang ada. Perusahaan besar cenderung untuk memanipulasi laba untuk mengurangi pajak yang terutang serta menghindari penurunan laba dari periode sebelumnya. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan yang diukur dengan *log natural* (*ln*) dari total aset, sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan (size)} = \text{Ln (total aktiva)}$$

3.3.3.3 *Leverage*

Leverage merupakan rasio utang atau sering dikenal dengan istilah rasio solvabilitas yang mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba. *Leverage* perusahaan yang tinggi menunjukkan risiko yang dihadapi oleh investor. Hal ini membuat para investor menuntut perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar disertai dengan pengungkapan informasi yang terperinci. Pada penelitian ini, pengukuran solvabilitas menggunakan rasio *leverage* sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \text{Total Hutang/Total Aset}$$

3.4 Metode Analisa Data

Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Berikut ini penjelasan lebih lanjut metode analisis data pada penelitian ini:

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas yang digunakan adalah Komolgorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, maka jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varians dari

residual pengamatan pada model regresi. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho*. Pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi dikatakan bebas gejala heteroskedastisitas.

3.4.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Pada umumnya, model regresi yang baik semestinya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dengan cara memperhatikan angka *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *Tolerance*. Dimana, jika nilai *Tolerance* $< (0,10)$ dalam model regresi dapat dikatakan terjadi gejala multikolinearitas dan jika nilai *Tolerance* $> (0,10)$ maka model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sementara, jika dilihat dengan memperhatikan nilai *VIF*, jika $VIF > 10.0$ maka terjadi gejala multikolinearitas dan jika $VIF < 10.0$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya $(t-1)$. Secara sederhana, analisis regresi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada

korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Metode pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Langrange Multiplier (LM Test)* dengan dasar pengambilan keputusan *chi square* hitung < *chi square* tabel maka model regresi dikatakan bebas gejala autokorelasi.

3.4.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh dari variabel bebas (anti korupsi) dan variabel kontrol (profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA, *leverage* yang diukur dengan *debt to asset ratio*, dan *SIZE*) terhadap variabel terikat (manajemen laba). Adapun rumus persamaan regresi pada penelitian ini adalah:

$$EM_{it} = \alpha - \beta_1 AKD_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 LEV_{it} - \beta_4 SIZE_{it} + year\ effect + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EM_{it}	= Manajemen laba perusahaan i pada tahun t
α	= Konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
AKD_{it}	= Pengungkapan anti korupsi perusahaan i pada tahun t
ROA_{it}	= Profitabilitas perusahaan i pada tahun t
$SIZE_{it}$	= Ukuran perusahaan pada perusahaan i pada tahun t
LEV_{it}	= Hutang / risiko keuangan pada perusahaan i pada tahun t
<i>year effect</i>	= Kontrol tahun penelitian
ε_{it}	= Error

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi / R^2 berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Apabila nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) diartikan bahwa kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Juga sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) diartikan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

3.4.3.2 Uji T

Uji statistik T digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi pada level 0,05 (5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ dan terdapat koefisien regresi dengan tanda positif ($\beta > 0$) artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ dan terdapat koefisien regresi dengan tanda negatif ($\beta < 0$) artinya terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

- Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan didukung apabila hasil pengujiannya:

H1: memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi negatif ($\beta < 0$)

3.4.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel variabel bebas yang dimasukkan kedalam model bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengukur mengenai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model *goodness of fit* dapat diukur dengan nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji F sebagai berikut:

1. *Pvalue* $< 0,05$ menggambarkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.
2. *Pvalue* $> 0,05$ menggambarkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini yang diambil dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* resmi perusahaan. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pemilihan sampel pada penelitian ini dipilih berdasar metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 255 sampel. Berikut penjelasan tentang jumlah sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Total Perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020	179
2	Data laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang tidak tersedia dalam periode 2018 – 2020	(34)
3	Perusahaan Manufaktur yang mengalami rugi dalam periode 2018-2020	(60)
Jumlah Sampel Perusahaan		85
Tahun Penelitian		3
Jumlah Data Observasi		255

Sumber: Data diolah (2022)

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan penyebaran data terhadap nilai rata-rata (*mean*). Statistik deskriptif digunakan sebagai acuan di dalam penelitian untuk menjelaskan hasil analisis dari pengujian hipotesis penelitian. Hasil statistik deskriptif semua variabel penelitian untuk 1 (satu) persamaan regresi yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKD	255	32.00	63.00	46.8824	10.46300
ROA	255	1.00	19.00	4.5451	2.54505
LEV	255	9.00	68.00	34.5686	14.43810
SIZE	255	1273.00	3075.00	2296.8118	505.89682
EM	255	-139.00	5.00	-57.8941	23.72564
Valid N (listwise)	255				

Sumber: Data diolah (2022)

Jumlah sampel penelitian terdiri dari 255 pengamatan. Berdasar tabel (4.2). Variabel independen (AKD) pengungkapan anti korupsi memiliki nilai minimum 0,32 pada Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) tahun 2018 dan nilai maksimum 0,63 pada Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) tahun 2020, nilai rata-rata pengungkapan anti korupsi adalah 46,8824 dan standar deviasi 10,46300.

Variabel kontrol profitabilitas (*ROA*) memiliki nilai minimum 0,01 pada PT Cahaya Asa Keramik Tbk (CAKK) tahun 2019 dan nilai maksimum 0,19 pada PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) tahun 2018, nilai rata-rata profitabilitas (*ROA*) adalah 4.5451 dan standar deviasi 2.54505.

Variabel kontrol *leverage* (*DAR*) memiliki nilai minimum 0,09 pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2019 dan nilai maksimum 0,68 pada PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) tahun 2020, nilai rata-rata *leverage* (*DAR*) 34,5686 dan standar deviasi 14,43810.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai minimum 12,73 pada PT Astra International Tbk (ASII) tahun 2020 dan nilai maksimum 30,75 pada PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) tahun 2020, nilai rata-rata ukuran perusahaan (*SIZE*) adalah 2296,8118 dan standar deviasi 505,89682.

Variabel dependen manajemen laba memiliki nilai minimum -1,39 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2020 dan nilai maksimum 0,05 pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2018, nilai rata-rata manajemen laba adalah -57,8941 dan standar deviasi 23,72564.

4.3 Uji Asumsik Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan model regresi yang telah dipilih memenuhi sifat statistik yaitu estimator terbaik, linear, dan tidak bias (*best linear unbiased estimator/BLUE*). Tahapan pengujian asumsi klasik dalam studi ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dengan menggunakan program SPSS yang mana data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berikut tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		255
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	22.93249302
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.048
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel (4.3) menggambarkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai residual sebesar 0,200 ($>0,05$) signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Spearman's rho*. Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan model Uji *Spearman's rho*:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	AKD	Correlation Coefficient	.099
		Sig. (2-tailed)	.882
		N	255
	ROA	Correlation Coefficient	-.020
		Sig. (2-tailed)	.746
		N	255
	LEV	Correlation Coefficient	-.030
		Sig. (2-tailed)	.633
		N	255
	SIZE	Correlation Coefficient	-.077
		Sig. (2-tailed)	.218
		N	255

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil Uji *Spearman's rho* di atas, variabel independen (anti korupsi) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,882 > (0,05)$. Variabel kontrol profitabilitas (ROA) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,746 > (0,05)$; *leverage* memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,633 > (0,05)$; dan ukuran perusahaan memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,218 > (0,05)$. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen di dalam model regresi yang diajukan. Model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas

apabila mempunyai nilai $VIF \leq 10$ atau nilai *tolerance value* $\geq 0,10$. Berikut hasil Uji Multikolinearitas pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients								
Model		Unstandardized B	Coefficient Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	(Constant)	-47.074	9.913		-4.749	.001		
	AKD	-.445	.142	-.196	-3.123	.002	.947	1.056
	ROA	1.186	.594	.127	1.997	.047	.921	1.086
	LEV	.246	.124	.150	1.986	.048	.658	1.519
	SIZE	-.002	.003	-.036	-.484	.629	.684	1.462

a. Dependent Variable: EM

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil analisis uji multikolinearitas pada tabel (4.5) menunjukkan bahwa nilai *VIF* pada seluruh variabel independen dan kontrol di bawah 10 dan nilai *tolerance* pada seluruh variabel dependen dan kontrol bernilai di atas 0,10. Sehingga, hasil di atas menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi menggunakan model uji *Lagrange Multiplier*. Berikut hasil Uji autokorelasi pada tabel di bawah:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.293 ^a	.086	.064	22.27545467
a. Predictors: (Constant), UT_2, SIZE, ROA, AKD, UT_1, LEV				

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji autokorelasi pada tabel (4.6) menunjukkan bahwa *chi square* tabel (287,882) sedangkan *chi square* hitung = $n \times R\text{Square} = 0,086 \times 255 = 21,93$. Sehingga dari hasil dapat disimpulkan bahwa *chi square* hitung < *chi square* tabel atau $21,93 < 287,882$ sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-47.074	9.913		-4.749	.001
	AKD	-.445	.142	-.196	-3.123	.002
	ROA	1.186	.594	-.127	1.997	.047
	LEV	.246	.124	-.150	1.986	.048
	SIZE	-.002	.003	-.036	-.484	.629

a. Dependent Variable: EM

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil analisis linear berganda pada tabel (4.7) maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

$$EM = - 47,074 - 0,445X_1 + 1,186X_2 + 0,246X_3 - 0,002X_4 + year\ effect + \varepsilon_t$$

Berdasarkan hasil model persamaan analisis linear berganda di atas, dapat disimpulkan:

1. Nilai *intercept* konstanta adalah sebesar -47,074. Hasil ini menyimpulkan bahwa apabila nilai seluruh variabel independen sebesar 0,000 maka besarnya nilai konstanta akan sebesar -47,074 satuan.
2. Variabel anti korupsi (X1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar - 0,445. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan anti korupsi sebesar satu satuan, maka akan berpengaruh menurunkan variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 0,445 satuan.
3. Variabel kontrol profitabilitas (ROA) (X2) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 1,186. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan

profitabilitas (ROA) sebesar satu satuan, maka berpengaruh menaikkan variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 1,186 satuan.

4. Variabel kontrol *leverage* (*DAR*) (*X3*) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,246. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan *leverage* (*DAR*) sebesar satu satuan, maka berpengaruh menaikkan variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 0,246 satuan.
5. Variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) (*X4*) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan (*SIZE*) sebesar satu satuan, maka berpengaruh menurunkan variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 0,002 satuan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menentukan seberapa besar kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol (0) dan satu (1) ($0 < R^2 < 1$) yang dinyatakan dalam presentase. Apabila nilai R^2 kecil, artinya variabel bebas sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 menandakan bahwa semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel (4.8) sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.256 ^a	.066	.051	23.11522
a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, AKD, LEV				
b. Dependent Variable: EM				

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,051 atau 5,1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pengungkapan anti korupsi mempunyai korelasi lemah dan menjelaskan variabel dependen manajemen laba yang terbatas.

4.5.2 Uji T

Uji T atau bisa disebut dengan uji signifikansi parameter individual yaitu bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel (4.9) sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-47.074	9.913		-4.749	.001
	AKD	-.445	.142	-.196	-3.123	.002
	ROA	1.186	.594	-.127	1.997	.047
	LEV	.246	.124	-.150	1.986	.048
	SIZE	-.002	.003	-.036	-.484	.629

a. Dependent Variable: EM

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

H1 = anti korupsi berkorelasi negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Nilai koefisien regresi anti korupsi sebesar -0,445 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa anti korupsi berkorelasi negatif dan signifikan menunjukkan $0,002 < 0,05$. Maka dari itu, H1 didukung oleh data.

4.5.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau biasa disebut dengan uji signifikansi keseluruhan dari regresi sample adalah uji secara menyeluruh oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah $\alpha < 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, secara keseluruhan variabel bebas berkorelasi signifikan terhadap variabel terikat. Namun, apabila nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya, secara

keseluruhan variabel bebas tidak berkorelasi signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9399.735	4	2349.934	4.398	.002 ^b
	Residual	133578.406	250	534.314		
	Total	142978.141	254			
a. Dependent Variable: EM						
b. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, AKD, LEV						

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel (4.10) nilai F hitung (*p-value*) diperoleh sebesar 4,398 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi < *p-value* atau $0,002 < 4,398$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berkorelasi secara simultan terhadap variabel dependen dan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan.

4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

4.6.1 Hubungan Anti Korupsi Terhadap Manajemen Laba

Hipotesis utama yang menduga bahwa pengungkapan anti korupsi berkorelasi negatif terhadap manajemen laba perusahaan secara statistik terdukung signifikan. Dimana nilai koefisien regresi sebesar -0,445 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Kusuma, 2020) yang menyatakan bahwa adanya

korelasi negatif hubungan pengungkapan anti korupsi terhadap manajemen laba perusahaan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, dimana perusahaan berusaha memberikan informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (dalam hal ini pengungkapan anti korupsi) dalam memperoleh legitimasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Perusahaan terdorong untuk mengungkapkan strategi pencegahan tindakan korupsi bukan karena menutupi tindakan manajemen laba apabila perusahaan melakukan tindakan tersebut, tetapi dikarenakan perusahaan sadar akan legitimasi yang diberikan masyarakat terhadap operasional perusahaan. Menurut (Hess, 2009) pengungkapan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan membantu mereka dalam mencapai tujuan internal dan eksternal dimana perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawannya dan menyadari konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi citra, integritas, dan legitimasi terlibat dalam korupsi. Pengungkapan anti korupsi yang lebih banyak akan membatasi terjadinya praktik manajemen laba. Perusahaan yang memiliki komitmen yang kuat atas tanggung jawab sosial untuk mendapatkan legitimasi di lingkungan sekitar akan beroperasi sesuai dengan etika dan norma yang berlaku sehingga akan membatasi praktik manajemen laba yang secara etika tidak dapat diterima oleh sebagian besar orang. Jika perusahaan mengungkapkan akuntabilitas sosial yang lebih luas (seperti pengungkapan anti korupsi), maka manajemen laba akan

menurun, karena perusahaan yang memiliki pengungkapan yang lebih luas menunjukkan transparansi yang lebih baik, dapat dipercaya, dan berkomitmen terhadap pengungkapan anti korupsi, sehingga cenderung tidak melakukan manajemen laba yang justru dapat merusak kepercayaan tersebut.

4.6.2 Peranan Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan sebagai variabel konstan yang bukan berada dalam bagian dari eksperimen atau memberikan kendali terhadap variabel bebas dan terikat, penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini dapat memberikan efek hasil dalam pengujian data. Penelitian ini juga menguji 3 variabel kontrol yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen selain variabel independen. Variabel kontrol pada studi ini yaitu profitabilitas (*ROA*), *leverage* (*DAR*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*). Berdasarkan hasil uji regresi terkait variabel kontrol yang tersaji pada tabel hasil uji T, menunjukkan bahwa profitabilitas (*ROA*), dan *leverage* (*DAR*) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat

Hasil dari variabel kontrol profitabilitas (*ROA*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,186 dan nilai signifikansi 0,047. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Kusuma, 2020) yang menyatakan bahwa *ROA* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis

teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 1990) dimana perusahaan mengacu pada rencana bonus (*bonus plan hipotesis*) dalam memilih metode akuntansi dengan melakukan perubahan laba yang dilaporkan. Hal ini membuktikan bahwa manajer menggunakan keuntungan perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang diterimanya. Oleh karena itu, semakin tinggi laba, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh tindakan manajemen laba. Perusahaan dengan ROA yang tinggi disebabkan oleh nilai laba bersih yang tinggi, perusahaan akan cenderung lebih mudah dalam melakukan manajemen laba berupa menaikkan atau menurunkan laba maupun dengan teknik manajemen laba lainnya. Perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung melakukan manajemen laba guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, hal ini biasa dilakukan dengan melakukan penurunan laba (*income decreasing*).

Hasil dari variabel kontrol *leverage* (*DAR*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,246 dan nilai signifikansi 0,048. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Kusuma, 2020) yang menyatakan bahwa *DAR* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang mendukung hipotesis perjanjian utang dimana perusahaan memilih metode akuntansi berdasarkan perjanjian utang. Semakin tinggi *laverage*, dan tingkat utang, semakin besar peluang untuk melakukan tindakan manajemen laba. Tingkat *leverage* yang tinggi akan

memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba perusahaan. Manajer akan berusaha untuk melakukan beberapa cara yang dapat meningkatkan nilai aktiva, mengurangi jumlah hutang atau meningkatkan pendapatan sehingga laba perusahaan akan meningkat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi risiko menurunnya kepercayaan para investor pada kemampuan perusahaannya kedepan.

Hasil dari variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana hasil koefisien regresi yang didapat sebesar -0,002 dan nilai signifikansi 0,629. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fandriani & Tunjung, 2019) yang menyatakan bahwa *SIZE* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran suatu perusahaan belum tentu mampu menjadi tolok ukur perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Penyebab tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap manajemen laba disebabkan karena pandangan apabila total asset yang dimiliki semakin banyak, perusahaan akan khawatir dalam melakukan manajemen laba karena perhatian dari pihak luar akan semakin tinggi. Beberapa perusahaan lainnya berpandangan bahwa melalui peningkatan asset dapat menjadi media dalam melakukan manajemen laba

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan anti korupsi dengan manajemen laba. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif signifikan antara pengungkapan anti korupsi dengan manajemen laba. Umumnya, pengungkapan anti korupsi digunakan oleh perusahaan dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan tindakan anti korupsi. Tindakan manajemen laba lebih rendah dengan peningkatan tindakan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol profitabilitas (*ROA*), *leverage* (*DAR*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*). Dimana dari variabel kontrol tersebut (profitabilitas dan *leverage*) memberikan hasil positif yang signifikan yang konsisten dengan teori akuntansi positif yang mendukung rencana bonus dan hipotesis perjanjian utang. Variabel kontrol lainnya yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yaitu:

- a. Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan untuk memberikan referensi penelitian anti korupsi terhadap manajemen laba. Keberadaan

pengungkapan anti korupsi diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu tentang hubungan anti korupsi dan manajemen laba.

- b. Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan acuan bahwa pengungkapan anti korupsi yang tinggi berhubungan dengan tindakan manajemen laba yang rendah. Tingginya pengungkapan anti korupsi yang dilaporkan oleh perusahaan menunjukkan kesadaran, kemampuan, ketrampilan, aktualisasi sikap dan perilaku yang berintegritas dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan berdaya saing tinggi.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perusahaan terkait dengan kegiatan anti korupsi perusahaan yang dapat mempengaruhi reputasi dan citra yang positif perusahaan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan komposisi sampel yang sangat banyak dan mendapatkan banyak kesulitan dalam melakukan pengujian.
- b. Mengukur manajemen laba dengan menggunakan model modifikasi Jones yang dikembangkan oleh (Dechow et al., 1995).

5.4 Saran

Studi masa depan perlu dilakukan dengan menggunakan langkah:

- a. Menggunakan model pendekatan baru untuk menghitung manajemen laba. Seperti pendekatan *revenue discretionary model* yang dikembangkan oleh (Stephen R. Stubben, 2010).

- b. Menambahkan kriteria agar sampel tidak terlalu banyak sehingga memudahkan untuk melakukan pengujian data, misalnya “perusahaan yang diambil sampel harus menggunakan satuan mata uang rupiah”, hal ini ditambahkan sebagai kriteria yaitu agar tidak menimbulkan perbedaan kurs.
- c. Menambah atau menggunakan variabel lain yang lebih mendukung untuk penelitian selanjutnya. Misalnya ukuran KAP, *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan arus kas operasi (Puspitasari Emy Puji, 2019).



DAFTAR PUSTAKA

- Chih, H. L., Shen, C. H., & Kang, F. C. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence. *Journal of Business Ethics*, 79(1–2), 179–198. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9383-7>
- Clark, G. L., & Hebb, T. (2005). Why should they care? The role of institutional investors in the market for corporate global responsibility. *Environment and Planning A*, 37(11), 2015–2031. <https://doi.org/10.1068/a38116>
- Copeland, R. M. (1968). Income Smoothing. In *Empirical Research in Accounting: Selected Studies* (Vol. 6).
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. In *Source: The Accounting Review* (Vol. 70, Issue 2).
- Fandriani, V., & Tunjung, H. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* (Issue 2).
- Gaultier-Gaillard, S., Louisot, J. P., & Rayner, J. (2009). Managing reputational risk - From theory to practice. In *Reputation Capital: Building and Maintaining Trust in the 21st Century* (pp. 161–178). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01630-1_11
- Gunny, K. (2005). *What Are the Consequences of Real Earnings Management?*
- Guthrie, J., Cuganesan, S., & Ward, L. (2006). *LEGITIMACY THEORY: A STORY OF REPORTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MATTERS WITHIN THE AUSTRALIAN FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY Coca-cola Amatil*. <http://ssrn.com/abstract=1360518><http://ssrn.com/abstract=1360518>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Healy, P. M., Wahlen, J. M., Miller, G., Noe, C., Petroni, K., & Salamon, J. (1998). *A REVIEW OF THE EARNINGS MANAGEMENT LITERATURE AND ITS IMPLICATIONS FOR STANDARD SETTING*.
- Hess, D. (2009). Catalyzing corporate commitment to combating corruption. *Journal of Business Ethics*, 88(SUPPL. 4), 781–790. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0322-7>
- Hills, G., Fiske, L., Mahmud, A., & Francisco, S. (2009). *Anti-corruption as Strategic CSR: A call to action for corporations* *Anti-corruption as Strategic CSR: A call to action for corporations About FSG Social Impact Advisors*. http://www.fsg-impact.org/ideas/item/Anti-Corruption_as_Strategic_CSR.htmlwww.fsg-impact.org

- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Karim, N. K., Animah, A., & Sasanti, E. E. (2017). PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN: STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI INDEKS SRI KEHATI. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2), 28. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v15i2.5>
- Khasanah, P., & Kusuma, I. (2020). ANTI-CORRUPTION DISCLOSURE AND EARNINGS MANAGEMENT: A CASE IN INDONESIAN CAPITAL MARKET. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.06>
- Kim, Y., Park, M. S., & Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? *Accounting Review*, 87(3), 761–796. <https://doi.org/10.2308/accr-10209>
- Kimbro, M. B. (2002). A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 17(4), 325–350. <https://doi.org/10.1177/0148558X0201700403>
- Lloyd Bierstaker, J. (2009). Differences in attitudes about fraud and corruption across cultures: Theory, examples and recommendations. In *Cross Cultural Management: An International Journal* (Vol. 16, Issue 3, pp. 241–250). <https://doi.org/10.1108/13527600910977337>
- Merchant, K. A., & Rockness, J. (1994). *The Ethics of Managing Earnings: An Empirical Investigation*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0278-4254\(94\)90013-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0278-4254(94)90013-2)
- Mohamad, N. R., Abdullah, S., Zulkifli Mokhtar, M., & Kamil, N. F. bin. (2012). The Effects of Board Independence, Board Diversity and Corporate Social Responsibility on Earnings Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1725925>
- O'Brien, M., Hill, D., & Autry, C. (2009). Customer behavioral legitimacy in retail returns episodes: Effects on retail salesperson role conflict. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 17(3), 251–266. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679170304>
- Prior, D., Surroca, J., & Tribó, J. A. (2007). *EARNINGS MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY **.
- Puspitasar Emy Puji. (2019). *2386-6150-1-PB*.

- Putra, A. M., Pagalung, G., & Habbe, A. H. (2018). Culture and corruption-driven agency costs and earnings management: Evidence from south east Asian countries. *Intangible Capital*, 14(4), 499–517. <https://doi.org/10.3926/ic.1289>
- Reverte, C. (2009). Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms. *Journal of Business Ethics*, 88(2), 351–366. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9>
- Stephen R. Stubben. (2010). *Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management*.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., & Habbash, M. (2010). Corporate environmental disclosure, corporate governance and earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 25(7), 679–700. <https://doi.org/10.1108/02686901011061351>
- Transparency International. (2010). *Table of Contents*. www.transparency.org
- van Dijken, F. (2007). Corporate social responsibility: market regulation and the evidence. *Managerial Law*, 49(4), 141–184. <https://doi.org/10.1108/03090550710836562>
- Watts, R. L. ;, & Zimmerman, J. L. (1990). *The Accounting Review* (Vol. 65).
- Wu, C., & Wu, X. (2005). Corporate Governance and Corruption: A Cross-Country Analysis. *An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 18(2), 151–170.
- Yip, E., Staden, C. van, & Cahan, S. (2011). Corporate Social Responsibility Reporting and Earnings Management: The Role of Political Costs. In *Business and Finance Journal Australasian Accounting, Business and Finance Journal* (Vol. 5, Issue 3). *Australasian Accounting*. <https://ro.uow.edu.au/aabfj>
- Zahra, S. A., Priem, R. L., & Rasheed, A. A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. In *Journal of Management* (Vol. 31, Issue 6, pp. 803–828). <https://doi.org/10.1177/0149206305279598>

LAMPIRAN

Tabulasi Data

NO	KODE	TAHUN	ACD	ROA	LEV	SIZE	EM
1	INTP	2018	0,58	0,04	0,34	22,14	-0,57
		2019	0,58	0,03	0,36	22,18	-0,62
		2020	0,63	0,07	0,34	22,12	-0,56
2	SMBR	2018	0,58	0,05	0,38	22,43	-0,90
		2019	0,63	0,04	0,35	22,44	-0,83
		2020	0,58	0,05	0,39	22,47	-0,85
3	SMGR	2018	0,58	0,04	0,38	22,14	-0,57
		2019	0,58	0,03	0,39	22,18	-0,62
		2020	0,63	0,07	0,63	22,12	-0,56
4	WTON	2018	0,58	0,05	0,58	29,82	-0,68
		2019	0,58	0,05	0,56	29,97	-0,35
		2020	0,58	0,03	0,50	29,77	-0,22
5	ARNA	2018	0,37	0,02	0,40	26,13	-0,80
		2019	0,37	0,04	0,45	26,22	-0,69
		2020	0,37	0,07	0,47	26,31	-0,47
6	CAKK	2018	0,58	0,04	0,50	26,52	-0,90
		2019	0,58	0,01	0,45	26,52	-0,88
		2020	0,58	0,02	0,30	26,60	-0,62
7	MARK	2018	0,58	0,05	0,35	22,38	-0,90
		2019	0,63	0,04	0,35	22,47	-0,83
		2020	0,58	0,05	0,37	22,47	-0,85
8	MLIA	2018	0,53	0,04	0,28	22,38	-0,69
		2019	0,53	0,02	0,28	22,47	-0,50
		2020	0,53	0,07	0,29	22,47	-0,81
9	ALKA	2018	0,37	0,02	0,45	26,13	-0,80
		2019	0,37	0,04	0,47	26,22	-0,69
		2020	0,37	0,07	0,48	26,31	-0,47
10	BTON	2018	0,32	0,06	0,47	26,10	-0,35
		2019	0,32	0,04	0,47	26,16	-0,34
		2020	0,32	0,05	0,47	26,18	-0,21
11	INAI	2018	0,37	0,07	0,55	27,97	-0,49
		2019	0,37	0,03	0,55	27,82	-0,27
		2020	0,37	0,03	0,60	27,96	-0,03
12	ISSP	2018	0,37	0,04	0,10	15,69	-0,44

		2019	0,37	0,03	0,11	15,68	-0,53
		2020	0,58	0,03	0,17	15,62	-0,31
13	TBMS	2018	0,37	0,04	0,13	15,69	-0,44
		2019	0,37	0,03	0,12	15,68	-0,53
		2020	0,58	0,03	0,15	15,62	-0,31
14	AGII	2018	0,37	0,02	0,20	17,71	-0,86
		2019	0,37	0,04	0,22	17,76	-0,87
		2020	0,37	0,05	0,25	17,78	-0,82
15	BRPT	2018	0,37	0,03	0,20	17,77	-0,81
		2019	0,58	0,02	0,20	17,84	-0,71
		2020	0,58	0,07	0,20	17,85	-0,82
16	BUDI	2018	0,37	0,05	0,20	16,04	-0,63
		2019	0,37	0,02	0,23	16,91	-0,73
		2020	0,37	0,02	0,21	16,90	-0,37
17	DPNS	2018	0,47	0,03	0,45	26,50	-0,45
		2019	0,47	0,03	0,45	26,49	-0,34
		2020	0,47	0,07	0,45	26,48	-0,36
18	EKAD	2018	0,47	0,03	0,28	27,47	-0,58
		2019	0,47	0,07	0,28	27,60	-0,65
		2020	0,47	0,04	0,31	27,71	-0,58
19	INCI	2018	0,58	0,04	0,24	26,69	-0,93
		2019	0,58	0,03	0,25	26,73	-0,48
		2020	0,58	0,07	0,25	26,82	-0,67
20	MDKI	2018	0,37	0,04	0,13	15,73	-0,76
		2019	0,37	0,04	0,14	15,74	-0,63
		2020	0,37	0,04	0,15	15,79	-0,72
21	MOLI	2018	0,37	0,05	0,16	21,35	-0,47
		2019	0,37	0,03	0,16	21,35	-0,42
		2020	0,37	0,03	0,18	21,55	-0,07
22	SRSN	2018	0,37	0,07	0,20	20,35	-0,43
		2019	0,37	0,05	0,22	20,47	-0,39
		2020	0,37	0,05	0,22	20,63	-0,60
23	TPIA	2018	0,58	0,07	0,25	16,97	-0,73
		2019	0,58	0,05	0,27	16,05	-0,51
		2020	0,58	0,05	0,31	16,09	-0,69
24	UNIC	2018	0,37	0,04	0,30	19,28	-0,40
		2019	0,37	0,05	0,36	19,21	-0,13
		2020	0,37	0,07	0,37	19,31	-0,61
25	AKPI	2018	0,37	0,05	0,23	21,85	-0,72
		2019	0,37	0,04	0,25	21,74	-0,60
		2020	0,37	0,05	0,25	21,70	-0,69

26	IGAR	2018	0,58	0,02	0,39	27,07	-0,21
		2019	0,58	0,07	0,36	27,15	-0,38
		2020	0,58	0,04	0,38	27,22	-0,25
27	IMPC	2018	0,37	0,04	0,16	28,49	-0,56
		2019	0,37	0,04	0,17	28,55	-0,60
		2020	0,37	0,04	0,17	28,62	-0,71
28	IPOL	2018	0,58	0,03	0,45	19,49	-0,66
		2019	0,37	0,07	0,41	19,44	-0,63
		2020	0,58	0,04	0,37	19,45	-0,69
29	PBID	2018	0,37	0,03	0,33	21,55	-0,47
		2019	0,37	0,05	0,29	21,57	-0,62
		2020	0,37	0,04	0,30	21,61	-0,16
30	TALF	2018	0,37	0,05	0,23	27,73	-0,96
		2019	0,37	0,07	0,22	27,92	-0,74
		2020	0,37	0,03	0,25	28,02	-0,84
31	TRST	2018	0,37	0,04	0,28	29,09	-0,91
		2019	0,37	0,03	0,29	29,10	-0,69
		2020	0,37	0,04	0,29	29,07	-0,81
32	CPIN	2018	0,37	0,03	0,25	19,13	-0,79
		2019	0,37	0,04	0,28	19,19	-0,74
		2020	0,37	0,03	0,28	19,25	-0,09
33	JPFA	2018	0,58	0,02	0,38	18,03	-0,77
		2019	0,58	0,04	0,40	18,04	-0,65
		2020	0,58	0,07	0,56	18,07	-0,66
34	SIPD	2018	0,58	0,01	0,50	14,60	-0,78
		2019	0,58	0,03	0,52	14,72	-0,91
		2020	0,58	0,05	0,55	14,77	-0,51
35	ALDO	2018	0,58	0,01	0,28	14,60	-0,78
		2019	0,58	0,03	0,28	14,72	-0,91
		2020	0,58	0,05	0,31	14,77	-0,51
36	FASW	2018	0,37	0,04	0,56	30,03	-1,05
		2019	0,58	0,05	0,58	30,01	-0,65
		2020	0,37	0,03	0,60	30,07	-0,78
37	INKP	2018	0,37	0,05	0,45	15,98	-0,55
		2019	0,37	0,03	0,44	15,96	-0,46
		2020	0,37	0,03	0,47	15,96	-0,45
38	KDSI	2018	0,37	0,03	0,42	27,96	-0,53
		2019	0,37	0,05	0,45	27,86	-0,53
		2020	0,37	0,05	0,48	27,85	-0,26
39	SWAT	2018	0,42	0,03	0,36	27,03	-0,75
		2019	0,42	0,03	0,41	27,13	-0,79

		2020	0,42	0,04	0,44	27,19	-0,49
40	ASII	2018	0,37	0,04	0,42	14,75	-0,96
		2019	0,37	0,07	0,44	14,77	-0,60
		2020	0,37	0,05	0,43	12,73	-0,50
41	AUTO	2018	0,32	0,04	0,29	16,58	-0,78
		2019	0,32	0,05	0,27	16,59	-0,68
		2020	0,32	0,03	0,26	16,54	-0,50
42	GTJL	2018	0,37	0,03	0,15	16,80	-0,68
		2019	0,37	0,07	0,15	16,75	-0,60
		2020	0,37	0,05	0,15	16,69	-0,54
43	INDS	2018	0,37	0,02	0,34	25,54	-0,70
		2019	0,37	0,04	0,29	25,67	-0,61
		2020	0,37	0,02	0,37	25,55	-0,58
44	LPIN	2018	0,37	0,04	0,34	26,43	-0,41
		2019	0,37	0,03	0,32	26,51	-0,54
		2020	0,37	0,02	0,37	26,55	-0,63
45	SMSM	2018	0,37	0,04	0,34	26,43	-0,41
		2019	0,37	0,03	0,32	26,51	-0,54
		2020	0,37	0,02	0,37	26,55	-0,63
46	INDR	2018	0,47	0,13	0,45	20,51	-0,69
		2019	0,47	0,10	0,46	20,44	-0,55
		2020	0,47	0,09	0,46	20,45	-0,41
47	PBRX	2018	0,37	0,03	0,45	20,18	-0,26
		2019	0,37	0,03	0,46	20,31	-0,24
		2020	0,37	0,03	0,47	20,36	-0,10
48	SRIL	2018	0,58	0,04	0,45	21,03	-0,76
		2019	0,58	0,02	0,51	21,17	-0,48
		2020	0,58	0,02	0,64	21,34	-0,37
49	STAR	2018	0,37	0,04	0,45	27,15	-0,53
		2019	0,37	0,05	0,45	27,09	-0,11
		2020	0,58	0,03	0,45	26,93	-0,01
50	TRIS	2018	0,58	0,04	0,36	22,14	-0,57
		2019	0,58	0,03	0,30	22,18	-0,62
		2020	0,63	0,07	0,34	22,12	-0,56
51	JECC	2018	0,58	0,05	0,35	27,90	-0,90
		2019	0,63	0,04	0,35	27,87	-0,83
		2020	0,58	0,05	0,37	27,74	-0,85
52	SCCO	2018	0,37	0,07	0,50	29,06	-0,52
		2019	0,37	0,05	0,53	29,11	-0,55
		2020	0,37	0,05	0,54	28,95	-0,53
53	VOKS	2018	0,58	0,04	0,36	22,14	-0,57

		2019	0,58	0,03	0,30	22,18	-0,62
		2020	0,63	0,07	0,34	22,12	-0,56
54	JKSY	2018	0,37	0,04	0,45	27,07	-0,33
		2019	0,37	0,03	0,44	27,01	-0,31
		2020	0,37	0,02	0,40	26,93	0,01
55	PTSN	2018	0,58	0,05	0,27	27,90	-0,90
		2019	0,63	0,04	0,29	27,87	-0,83
		2020	0,58	0,05	0,32	27,74	-0,85
56	CAMP	2018	0,37	0,01	0,34	27,64	-0,33
		2019	0,37	0,03	0,35	27,69	-0,50
		2020	0,37	0,04	0,38	27,71	-0,45
57	CEKA	2018	0,42	0,04	0,16	27,79	0,05
		2019	0,37	0,07	0,19	27,96	0,01
		2020	0,58	0,03	0,20	28,08	-0,53
58	CLEO	2018	0,37	0,01	0,19	28,07	-0,98
		2019	0,37	0,03	0,45	28,25	-0,82
		2020	0,37	0,04	0,47	28,51	-0,81
59	DLTA	2018	0,42	0,04	0,43	27,79	0,05
		2019	0,37	0,07	0,55	27,96	0,01
		2020	0,58	0,03	0,58	28,08	-0,53
60	GOOD	2018	0,42	0,03	0,55	29,07	-0,98
		2019	0,42	0,02	0,50	29,25	-0,82
		2020	0,37	0,04	0,55	29,51	-0,81
61	HOKI	2018	0,37	0,04	0,44	27,36	-0,69
		2019	0,37	0,02	0,34	27,47	-0,79
		2020	0,37	0,04	0,43	27,53	-0,06
62	ICBP	2018	0,37	0,04	0,55	27,36	-0,69
		2019	0,37	0,02	0,49	27,47	-0,79
		2020	0,37	0,05	0,50	27,53	-0,06
63	INDF	2018	0,37	0,05	0,10	18,39	-0,76
		2019	0,37	0,01	0,11	18,38	-0,78
		2020	0,37	0,05	0,12	18,91	-1,39
64	MLBI	2018	0,37	0,05	0,10	18,39	-0,76
		2019	0,37	0,01	0,09	18,38	-0,78
		2020	0,37	0,05	0,11	18,91	-1,39
65	MYOR	2018	0,37	0,05	0,42	28,50	-0,47
		2019	0,37	0,07	0,42	28,55	-0,46
		2020	0,37	0,04	0,45	28,62	-0,67
66	ROTI	2018	0,58	0,03	0,30	29,11	-0,63
		2019	0,58	0,05	0,30	29,17	-0,81
		2020	0,58	0,04	0,32	29,12	-0,69

67	SKBM	2018	0,58	0,02	0,28	28,20	-0,56
		2019	0,58	0,02	0,29	28,23	-0,55
		2020	0,58	0,02	0,31	28,20	-1,19
68	SKLT	2018	0,58	0,04	0,55	27,34	-0,72
		2019	0,58	0,02	0,58	27,40	-0,86
		2020	0,58	0,07	0,55	27,37	-0,57
69	STTP	2018	0,58	0,02	0,27	24,20	-0,56
		2019	0,58	0,02	0,25	24,23	-0,55
		2020	0,58	0,02	0,24	24,20	-1,19
70	ULTJ	2018	0,58	0,04	0,60	27,34	-0,72
		2019	0,58	0,02	0,65	27,40	-0,86
		2020	0,58	0,07	0,67	27,37	-0,57
71	GGRM	2018	0,58	0,03	0,15	18,05	-0,60
		2019	0,58	0,05	0,17	18,18	-0,60
		2020	0,58	0,02	0,18	18,17	-0,53
72	HMSP	2018	0,58	0,03	0,16	18,05	-0,60
		2019	0,58	0,05	0,16	18,18	-0,60
		2020	0,58	0,02	0,15	18,18	-0,53
73	WIIM	2018	0,37	0,04	0,48	27,86	-0,31
		2019	0,37	0,02	0,50	27,89	-0,40
		2020	0,37	0,05	0,52	28,11	-0,72
74	DVLA	2018	0,37	0,07	0,26	21,24	-0,21
		2019	0,37	0,02	0,25	21,33	-0,43
		2020	0,37	0,04	0,24	21,41	-0,21
75	KAEF	2018	0,37	0,07	0,25	21,24	-0,21
		2019	0,37	0,02	0,25	21,33	-0,43
		2020	0,37	0,04	0,33	21,41	-0,21
76	KLBF	2018	0,58	0,09	0,65	30,53	-0,50
		2019	0,58	0,10	0,55	30,64	-0,56
		2020	0,58	0,11	0,55	30,75	-0,57
77	PEHA	2018	0,58	0,13	0,30	21,35	-0,42
		2019	0,58	0,09	0,31	21,46	-0,40
		2020	0,58	0,08	0,29	21,37	-0,55
78	PYFA	2018	0,58	0,07	0,20	15,53	-0,50
		2019	0,58	0,05	0,20	15,63	-0,56
		2020	0,58	0,02	0,17	15,75	-0,57
79	SIDO	2018	0,58	0,07	0,15	21,35	-0,42
		2019	0,58	0,05	0,44	21,46	-0,40
		2020	0,58	0,03	0,48	21,37	-0,55
80	TSPC	2018	0,58	0,19	0,60	29,69	-0,41
		2019	0,58	0,17	0,65	29,76	-0,53

		2020	0,58	0,15	0,68	29,84	-0,38
81	ADES	2018	0,58	0,01	0,15	13,69	-0,73
		2019	0,58	0,05	0,15	13,62	-0,68
		2020	0,53	0,03	0,15	13,77	-0,44
82	KINO	2018	0,58	0,03	0,16	15,69	-0,41
		2019	0,58	0,04	0,15	15,76	-0,53
		2020	0,58	0,06	0,17	15,84	-0,38
83	UNVR	2018	0,58	0,07	0,10	13,69	-0,73
		2019	0,58	0,06	0,11	13,62	-0,68
		2020	0,53	0,09	0,15	13,77	-0,44
84	CINT	2018	0,58	0,10	0,55	25,69	-0,41
		2019	0,58	0,11	0,55	25,50	-0,53
		2020	0,58	0,12	0,60	25,30	-0,38
85	WOOD	2018	0,58	0,07	0,15	13,69	-0,73
		2019	0,58	0,08	0,15	13,62	-0,68
		2020	0,53	0,09	0,15	13,77	-0,68

Panduan *Ceklist* GRI 205: Anti Korupsi

Aspek	No	Indikator
Anti Korupsi	1	Prosedur pengkajian risiko organisasi terhadap korupsi, termasuk kriteria yang digunakan dalam pengkajian risiko, seperti lokasi, kegiatan, dan sektor.
	2	Cara organisasi mengidentifikasi dan mengatur konflik kepentingan yang mungkin dimiliki oleh karyawan atau orang yang terkait dengan kegiatan, produk, atau jasa dari organisasi. Konflik kepentingan untuk badan tata Kelola tertinggi tercakup dalam pengungkapan 102-25 dari GRI 102. Pengungkapan Umum.
	3	Cara organisasi memastikan bahwa donasi amal dan sponsor pensponsoran (finansial dan benda atau barang) yang diberikan kepada organisasi lain bukanlah sebuah penyuapan terselubung. Penerima donasi amal dan sponsor persponsoran (finansial dan benda atau barang) dapat mencakup organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi pribadi, dan acara-acara
	GRI 103 Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103)	

	4	Sejauh mana pelatihan anti korupsi untuk para anggota badan tata Kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lain yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi.
	5	Dibagian mana pelatihan anti korupsi untuk para anggota badan tata Kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lainnya yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi ini diberikan (contohnya ketika karyawan baru bergabung bersama organisasi atau ketika membuka hubungan dengan mitra bisnis baru); dan frekuensi pelatihan (misalnya, setahun sekali atau dua kali dalam setahun)
	6	Apakah organisasi berpartisipasi dalam Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi, yang termasuk strategi untuk kegiatan kolektif
	7	Apakah organisasi berpartisipasi dalam Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi, yang termasuk daftar inisiatif kegiatan kolektif yang diikuti oleh organisasi
	8	Apakah organisasi berpartisipasi dalam Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi, yang termasuk penjelasan mengenai komitmen utama dari inisiatif-inisiatif ini.
205-1 Operasi – operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	9	Laporan mengenai jumlah dan persentase operasi yang dinilai berkaitan dengan risiko korupsi
	10	Laporan mengenai risiko signifikansi korupsi yang diidentifikasi melalui penilaian risiko
205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi	11	Laporan jumlah total dan presentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut wilayah
	12	Laporan jumlah total dan presentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi, yang

		dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah
	13	Laporan jumlah total dan presentase mitra bisnis yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah
	14	Laporan jumlah total dan presentase anggota badan tata kelola yang telah menerima pelatihan mengenai anti korupsi yang dikelompokkan menurut wilayah
	15	Laporan jumlah total dan persentase karyawan yang telah menerima pelatihan mengenai anti korupsi yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah
205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	16	Kejadian korupsi yang terbukti
	17	Insiden yang terbukti dimana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi
	18	Insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi
	19	Laporan khusus kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawan selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut